



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 12 / 32

NOMOR KLAS. :

A B A I

I B / 8 / T

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 030 /A/JA/10/2008**

TENTANG

**MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI SUKA MAKMUE DAN
KEJAKSAAN NEGERI BLANGPIDIE DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN
TINGGI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, KEJAKSAAN NEGERI WANGI-WANGI
DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA,
KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG DAN KEJAKSAAN NEGERI PADANG
ARO DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT, DAN
KEJAKSAAN NEGERI SINGAPARNA DALAM DAERAH HUKUM
KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- bahwa pada saat ini telah ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kejaksaan Negeri Blangpidie, Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, dan Kejaksaan Negeri Singaparna, perlu ditindaklanjuti pelaksanaannya;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Rincian Tugas dan wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
 - bahwa berdasarkan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2008 Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kejaksaan Negeri Blangpidie, Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, dan Kejaksaan Negeri Singaparna ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c dipandang perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Suka Makmue dan Kejaksaan Negeri Blangpidie dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam, Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung dan Kejaksaan Negeri Padang Aro dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan Kejaksaan Negeri Singaparna dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Kota Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4426);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir berdasarkan Keputusan

Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003.

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kejaksaan Negeri Blangpidie, Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, dan Kejaksaan Negeri Singapura

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor : B/2795.I/M.PAN/9/2008t tanggal 26 September 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI SUKA MAKMUE DAN KEJAKSAAN NEGERI BLANGPIDIE DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, KEJAKSAAN NEGERI WANGI-WANGI DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA, KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG DAN KEJAKSAAN NEGERI PADANG ARO DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT, DAN KEJAKSAAN NEGERI SINGAPARNA DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT.

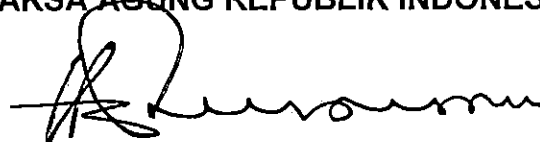
PERTAMA : Kejaksaan Negeri Suka Makmue berkedudukan di Suka Makmue dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Nagan Raya, Kejaksaan Negeri Blangpidie berkedudukan di Blangpidie dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi berkedudukan di Wangi-Wangi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Wakatobi, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung berkedudukan di Pulau Punjung dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Dharmasraya, Kejaksaan Negeri Padang Aro berkedudukan di Padang Aro dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Solok Selatan, Kejaksaan Negeri Singapura berkedudukan di Singapura dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Tasikmalaya masing-masing sebagai Kejaksaan Negeri tipe B.

KEDUA : Kedudukan, tugas dan wewenang serta fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kejaksaan Negeri Blangpidie, Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, dan Kejaksaan Negeri Singapura adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 624 sampai dengan 677 BAB XVII Bagian Ketigabelas sampai dengan Ketujuhbelas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003.

- KETIGA** : Semua pegawai dan barang inventaris baik barang bergerak maupun tak bergerak Cabang Kejaksaan Negeri Tapaktuan di Blangpidie menjadi milik Kejaksaan Negeri Blangpidie.
- KEEMPAT** : Nama dan tipe Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kejaksaan Negeri Blangpidie, Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, dan Kejaksaan Negeri Singaparna sebagaimana tercantum pada Lampiran I dalam Daftar nama Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia, sedangkan bagan organisasi tercantum dalam Lampiran II Peraturan Jaksa Agung ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KELIMA** : Sejak berlakunya peraturan ini, di seluruh Indonesia terdapat 31 Kejaksaan Tinggi, 76 Kejaksaan Negeri tipe A, 302 Kejaksaan Negeri tipe B dan 90 Cabang Kejaksaan Negeri.
- KEENAM** : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2008

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		16-10-08
2.	Karo Cana		15-10-08
3.	Kabag		15-10-08
4.	Kasubbag		15-10-2008
5.	Pelaksana		15-10-08
6.	Pengetik		15-10-2008

Lampiran I Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
 Nomor : PER- 030 /A/JA/10/2008
 Tanggal : 20 Oktober 2008.

**DAFTAR NAMA KEJAKSAAN TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI DAN
 CABANG KEJAKSAAN NEGERI DI SELURUH INDONESIA**

No.	KEJAKSAAN TINGGI	No	KEJAKSAAN NEGERI	TIPE	No	CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1	2	3	4	5	6	7
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM DI BANDA ACEH	1	BANDA ACEH	A		
		2	SABANG	B		
		3	SIGLI	B	1	SIGLI DI KOTA BAKTI
					2	SIGLI DI MEUREUDU
		4	LHOKSEUMAWE	B	3	TAPAKTUAN DI BAKONGAN
		5	LANGSA	B		
		6	TAKENGON	B		
		7	MEULABOH	B		
		8	TAPAKTUAN	B		
		9	KUTACANE	B		
		10	BIREUEN	B		
		11	LHOKSUKON	B		
		12	IDI	B		
		13	KUALA SIMPANG	B		
		14	SINABANG	B		
		15	CALANG	B		
		16	SINGKEL	B		
		17	BLANGKEJEREN	B		
		18	JANTHOI	B		
		19	BLANGPIDIE	B		
		20	SUKAMAKMUE	B		
II	SUMATERA UTARA DI MEDAN	1	MEDAN	A		
		2	BINJAI	A		
		3	PEMATANG SIANTAR	A	1	LUBUK PAKAM DI PANCUR BATU
		4	SIBOLGA	A		
		5	LUBUK PAKAM	A	2	LUBUK PAKAM DI LABUHAN DELI
		6	TEBING TINGGI	B	3	RANTAU PRAPAT DI KOTA PINANG
		7	TANJUNG BALAI	B		
		8	RANTAU PRAPAT	B	4	KABANJAHE DI TIGA BINANGA
		9	KABANJAHE	B	5	TARUTUNG DI SIBORONG- BORONG
		10	SIDIKALANG	B		
		11	TARUTUNG	B	6	PADANG SIDEMPUAN DI SIPIROK
		12	PADANG SIDEMPUAN	B	7	PADANG SIDEMPUAN DI SUBUHUAN
					8	PADANG SIDEMPUAN DI GUNUNG TUA
		13	GUNUNGSITOLI	B	9	GUNUNG SITOLI DI PULAU TELO
					10	GUNUNG SITOLI DI TELUK DALAM
		14	KISARAN	B	11	KISARAN DI LABUHAN RUKU
		15	SIANTAR	B	12	STABAT DI PANGKALAN BRANDAN
		16	STABAT	B		
		17	BELAWAN	B	13	BALIGE DI PORSEA
		18	BALIGE	B		
		19	PANYABUNGAN	B		
					14	BALIGE DI PANGURURAN
					15	PANYABUNGAN DI KOTANOPAN
					16	PANYABUNGAN DI NATAL

1	2	3	4	5	6	7
III	SUMATERA BARAT DI PADANG	1	PADANG	A		
		2	BUKITTINGGI	A		
		3	PAYAKUMBUH	B	1	PAYAKUMBUH DI PKL KOTA BARU
					2	PAYAKUMBUH DI SULIKI
		4	PARIAMAN	B		
		5	SAWAHLUNTO	B		
		6	SOLOK	B	3	SOLOK DI MUARA LABUH
					4	SOLOK DI ALAHAN PANJANG
		7	PADANG PANJANG	B		
		8	BATUSANGKAR	B		
		9	LUBUK SIKAPING	B	5	LUBUK SIKAPING DI TALU
		10	PAINAN	B	6	PAINAN DI BALAI SELASA
		11	SIJUNJUNG	B	7	SIJUNJUNG DI SUNGAI DAREH
		12	LUBUK BASUNG	B	8	LUBUK BASUNG DI MANINJAU
		13	TUA PEJAT	B		
		14	SIMPANG EMPAT	B		
		15	<i>PULAU PUNJUNG</i>	<i>B</i>		
		16	<i>PADANG ARO</i>	<i>B</i>		
IV	RIAU DI PEKANBARU	1	PEKANBARU	A		
		2	RENGAT	B		
		3	DUMAI	B		
		4	BENGKALIS	B	1	BENGKALIS DI SELAT PANJANG
		5	TEMBILAHAN	B		
		6	BANGKINANG	B		
		7	PASIR PANGARAIAN	B		
		8	SIK SRI INDRAPURA	B		
		9	TELUK KUANTAN	B		
		10	PANGKALAN KERINCI	B		
		11	UJUNG TANJUNG	B		
V	JAMBI DI JAMBI	1	JAMBI	A		
		2	MUARA BULIAN	B	1	MUARA BULIAN DI MUARA TEMBESI
		3	MUARA BUNGO	B		
		4	SUNGAI PENUH	B		
		5	BANGKO	B		
		6	KUALA TUNGKAL	B	2	KUALA TUNGKAL DI NIPAH PAJANG
		7	SAROLANGUN	B		
		8	MUARA TEBO	B		
		9	MUARA SABAK	B		
		10	SENGETI	B		
VI	SUMATERA SELATAN DI PALEMBANG	1	PALEMBANG	A		
		2	KAYU AGUNG	B		
		3	BATURAJA	B	1	BATURAJA DI MARTAPURA
					2	BATURAJA DI MUARA DUA
		4	LAHAT	B	3	LAHAT DI TEBING TINGGI
		5	LUBUK LINGGAU	B		
		6	MUARA ENIM	B	4	MUARA ENIM DI PENDOPO
		7	SEKAYU	B		
		8	PRABUMULIH	B		
		9	PAGAR ALAM	B		
		10	PANGKALAN BALAI	B		

1	2	3	4	5	6	7
VII	BENGKULU DI BENGKULU	1	BENGKULU	A		
		2	CURUP	B		
		3	ARGAMAKMUR	B		
		4	MANNA	B		
		5	MUKOMUKO	B		
		6	TAIS	B		
		7	BINTUHAN	B		
		8	TUBEI	B		
		9	KEPAHIANG	B		
VIII	LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG	1	BANDAR LAMPUNG	A	1	BANDAR LAMPUNG DI PELABUHAN PANJANG
		2	KALIANDA	B		
		3	METRO	B		
		4	KOTABUMI	B		
		5	LIWA	B	2	LIWA DI KRUI
		6	GUNUNG SUGIH	B		
		7	SUKADANA	B		
		8	BLAMBANGAN UMPU	B		
		9	MENGKALA	B		
		10	KOTA AGUNG	B	3 4	KOTA AGUNG DI PRINGSEWU KOTA AGUNG DI TALANG PADANG
IX	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI JAKARTA	1	JAKARTA PUSAT	A		
		2	JAKARTA UTARA	A		
		3	JAKARTA BARAT	A		
		4	JAKARTA TIMUR	A		
		5	JAKARTA SELATAN	A		
X	JAWA BARAT DI BANDUNG	1	BANDUNG	A		
		2	CIREBON	A		
		3	BOGOR	A		
		4	SUKABUMI	A		
		5	PURWAKARTA	A		
		6	GARUT	A		
		7	TASIKMALAYA	A		
		8	BEKASI	A		
		9	CIBINONG	A		
		10	CIMAHI/BALE BANDUNG	A		
		11	DEPOK	A		
		12	INDRAMAYU	B		
		13	SUMEDANG	B		
		14	KUNINGAN	B		
		15	MAJALENGKA	B		
		16	CIAMIS	B		
		17	KARAWANG	B		
		18	CIANJUR	B		
		19	SUBANG	B		
		20	SUMBER	B		
		21	CIBADAK	B		
		22	CIKARANG	B		
		23	BANJAR	B		
		24	SINGAPARNA	B		

1	2	3	4	5	6	7
XI	JAWA TENGAH DI SEMARANG	1	SEMARANG	A	1	SEMARANG DI PELABUHAN SEMARANG
		2	SURAKARTA	A		
		3	PEKALONGAN	A		
		4	MAGELANG	A		
		5	PURWOKERTO	A		
		6	TEGAL	A		
		7	PATI	A		
		8	CILACAP	A		
		9	KUDUS	B		
		10	KLATEN	B		
		11	SALATIGA	B		
		12	REMBANG	B		
		13	PEMALANG	B		
		14	PURBALINGGA	B		
		15	PURWOREJO	B		
		16	KEBUMEN	B		
		17	SRAGEN	B		
		18	KENDAL	B		
		19	BLORA	B		
		20	BOYOLALI	B		
		21	BREBES	B		
		22	DEMAK	B		
		23	JEPARA	B		
		24	KARANGANYAR	B		
		25	SUKOHARJO	B		
		26	WONOGIRI	B		
		27	BANJAR NEGARA	B		
		28	TEMANGGUNG	B		
		29	WONOSOBO	B		
		30	BANYUMAS	B		
		31	BATANG	B		
		32	PURWODADI	B		
		33	AMBARAWA	B		
		34	SLAWI	B		
		35	MUNGKID	B		
		36	K A J E N	B		
XII	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA	1	YOGYAKARTA	A		
		2	SLEMAN	A		
		3	WONOSARI	B		
		4	WATES	B		
		5	BANTUL	B		
XIII	JAWA TIMUR DI SURABAYA	1	SURABAYA	A		
		2	MALANG	A		
		3	JEMBER	A		
		4	KEDIRI	A		
		5	MADIUN	A		
		6	PASURUAN	A		
		7	BOJONEGORO	A		
		8	BONDOWOSO	A		
		9	PAMEKASAN	A		
		10	SIDOARJO	A		
		11	KEPANJEN	A		
		12	MOJOKERTO	B		

1	2	3	4	5	6	7
		13	PROBOLINGGO	B		
		14	BANYUWANGI	B		
		15	BLITAR	B		
		16	JOMBANG	B		
		17	PONOROGO	B		
		18	GRESIK	B		
		19	LUMAJANG	B		
		20	TULUNG AGUNG	B		
		21	TRENGGALEK	B		
		22	NGANJUK	B		
		23	MAGETAN	B		
		24	TUBAN	B		
		25	NGAWI	B		
		26	SUMENEP	B		
		27	LAMONGAN	B		
		28	SAMPANG	B		
		29	BANGKALAN	B		
		30	PACITAN	B		
		31	SITUBONDO	B		
		32	BANGIL	B		
		33	KRAKSAAN	B		
		34	TANJUNG PERAK	B		
		35	B A T U	B		
XIV	KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK	1	PONTIANAK	A		
		2	SINGKAWANG	A	1	SINGKAWANG DI PAMANGKAT
		3	SINTANG	B		
		4	KETAPANG	B		
		5	SANGGAU	B	2	SANGGAU DI ENTIKONG
		6	MEMPAWAH	B		
		7	PUTUSIBAU	B		
		8	SAMBAS	B		
		9	BENGKAYANG	B		
		10	NGABANG	B		
XV	KALIMANTAN TENGAH DI PALANGKARAYA	1	PALANGKARAYA	A		
		2	SAMPIT	B		
		3	KUALA KAPUAS	B	1	KUALA KAPUAS DI PALINGKAU
		4	MUARA TEWEH	B		
		5	PANGKALANBUN	B		
		6	BUNTOK	B		
		7	PURUK CAHU	B		
		8	TAMIANG LAYANG	B		
		9	KASONGAN	B		
		10	KUALA PEMBUANG	B		
		11	SUKAMARA	B		
		12	NANGA BULIK	B		
		13	KUALA KURUN	B		
		14	PULANG PISAU	B		

1	2	3	4	5	6	7
XVI	KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	BANJARMASIN KANDANGAN KOTABARU MARTAPURA AMUNTAI BARABAI TANJUNG RANTAU PLEIHARI MARABAHAN BANJARBARU BATULICIN	A B B B B B B B B B B B		
XVII	KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	BALIKPAPAN SAMARINDA TENGGARONG TANAH GROGOT TANJUNG REDEP TARAKAN NUNUKAN BONTANG TANJUNG SELOR SENDAWAR SANGATTA MALINAU PENAJAM	A A A B B B B B B B B B B		
XVIII	SULAWESI UTARA DI MANADO	1 2 3 4 5 6 7 8 9	MANADO TONDANO KOTAMOBAGU TAHUNA BITUNG TOMOHON AMURANG MELONGUANE AIRMADIDI	A B B B B B B B B	1 2 3 4	KOTAMOBAGU DI BAROKO KOTAMOBAGU DI DOMUGA TAHUNA DI SIAU MELONGUANE DI BEO
XIX	SULAWESI TENGAH DI PALU	1 2 3 4	PALU LUWUK TOLI-TOLI POSO	A B B B	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	LUWUK DI BUNTA LUWUK DI PAGIMANA TOLI-TOLI DI LAULALANG TOLI-TOLI DI OGOTUA TOLI-TOLI DI BANGKIR POSO DI AMPANA POSO DI KOLONADALE POSO DI TENTENA POSO DI UNA-UNA/ WAKAI POSO DI BUNGKU

1	2	3	4	5	6	7
XX	SULAWESI TENGGARA DI KENDARI	5	DONGGALA	B	11	DONGGALA DI SABANG
		6	BANGGAI	B	12	DONGGALA DI TOMPE
		7	PARIGI	B	13	PARIGI DI TINOMBO
		8	BUOL	B	14	PARIGI DI MOUTONG
					15	BUOL DI PALELEH
					16	BUOL DI LOKODIDI
		1	KENDARI	A		
		2	BAU-BAU	B		
		3	KOLAKA	B		
		4	RAHA	B		
		5	UNAAHA	B		
		6	WANGI-WANGI	B		
XXI	SULAWESI SELATAN DI MAKASSAR	1	MAKASSAR	A	1	MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR
		2	PARE-PARE	A		
		3	PALOPO	A		
		4	SUNGGUMINASA	A	2	SUNGGUMINASA DI MALINO
		5	WATAMPONE/BONE	A	3	BONE DI POMPANUA
					4	BONE DI LAPARIAJA
					5	BONE DIKAJUARA
		6	MAMUJU	B		
		7	MAROS	B	6	MAROS DI CAMBA
		8	BANTAENG	B		
		9	PINRANG	B		
		10	SENGKANG	B		
		11	SOPPENG	B		
		12	BARRU	B		
		13	BULUKUMBA	B	7	BALUKUMBA DI KAJANG
		14	JENEPONTO	B		
		15	ENREKANG	B		
		16	MAJENE	B		
		17	MAKALE	B	8	MAKALE DI RANTEPAO
		18	PANGKAJENE	B		
		19	SELAYAR	B		
		20	POLEWALI	B		
		21	SIDENRENGRAPPANG	B		
		22	SINJAI	B		
		23	TAKALAR	B		
		24	MASAMBA	B		
		25	MAMASA	B		
		26	BELOPA	B		
		27	MALILI	B	9	MALILI DI WOTU

1	2	3	4	5	6	7
XII	BALI DI DENPASAR	1	DENPASAR	A	1	KLUNGKUNG DI NUSA PENIDA
		2	SINGARAJA	A		
		3	KLUNGKUNG	B		
		4	BANGLI	B		
		5	AMLAPURA	B		
		6	GIANYAR	B		
		7	NEGARA	B		
		8	TABANAN	B		
XXIII	NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM	1	MATARAM	A		
		2	PRAYA	B		
		3	SELONG	B		
		4	SUMBAWA BESAR	B		
		5	R A B A	B		
		6	DOMPU	B		
XXIV	NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG	1	KUPANG	A	1	KUPANG DI SEBA (SEBU)
		2	S O E	B		
		3	KEFAMENANU	B		
		4	ATAMBUA	B	2 3 4	LARANTUKA DI WAIWERANG RUTENG DI REO RUTENG DI LABUHAN BAJO
		5	ENDE	B		
		6	MAUMERE	B		
		7	LARANTUKA	B		
		8	RUTENG	B		
		9	BAJAWA	B		
		10	WAINGAPU	B		
		11	WAIKABUBAK	B		
		12	KALABAHI	B		
		13	LEWOLEBA	B		
		14	BAA	B		
XXV	MALUKU DI AMBON	1	AMBON	A	1 2 3 4 5 6	AMBON DI BANDANAERA AMBON DI SAPARUA MASOHI DI GESER MASOHI DI PIRU MASOHI DI WAHAI TUAL DI WONRELI
		2	MASOHI	B		
		3	TUAL	B		
		4	SAUMLAKI	B		
		5	NAMLEA	B		
		6	DOBO	B		

1	2	3	4	5	6	7
XXVI	PAPUA DI JAYAPURA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	JAYAPURA BIAK MANOKWARI SORONG FAK-FAK MERAUKE WAMENA NABIRE SERUI TIMIKA	A B B B B B B B B B		
XXVII	MALUKU UTARA DI SOFIFI	1 2 3 4 5 6	TERNATE SOASIU TOBELO LABUHA SANANA WEDA	B B B B B B	1 2	TERNATE DI MOROTAI TERNATE DI JAILOLO
XXVIII	BANTEN DI SERANG	1 2 3 4 5	SERANG TANGERANG PANDEGLANG RANGKASBITUNG CILEGON	A A B B B		
XXIX	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI PANGKAL PINANG	1 2 3 4 5	PANGKAL PINANG SUNGAILIAT TANJUNG PANDAN MENTOK MANGGAR	A B B B B	1	SUNGAILIAT DI BELINYU
XXX	GORONTALO DI KOTA GORONTALO	1 2 3 4 5	LIMBOTO GORONTALO TILAMUTA SUWAWA MARISA	B B B B B	1	LIMBOTO DI KWANDANG.

1	2	3	4	5	6	7
XXXI	KEPULAUAN RIAU DI TANJUNG PINANG	1	TANJUNG PINANG	A	1	TANJUNG PINANG DI DABO SINGKEP
		2	B A T A M TANJUNG BALAI KARIMUN	A	2	TANJUNG BALAI KARIMUN DI TANJUNG BATU TANJUNG BALAI KARIMUN DI MORO
		3		B		
		4	R A N A I	B	4	RANAI DI TAREMPA
J U M L A H		76/302		A/B	90	

Agustus 2008

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL
ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN

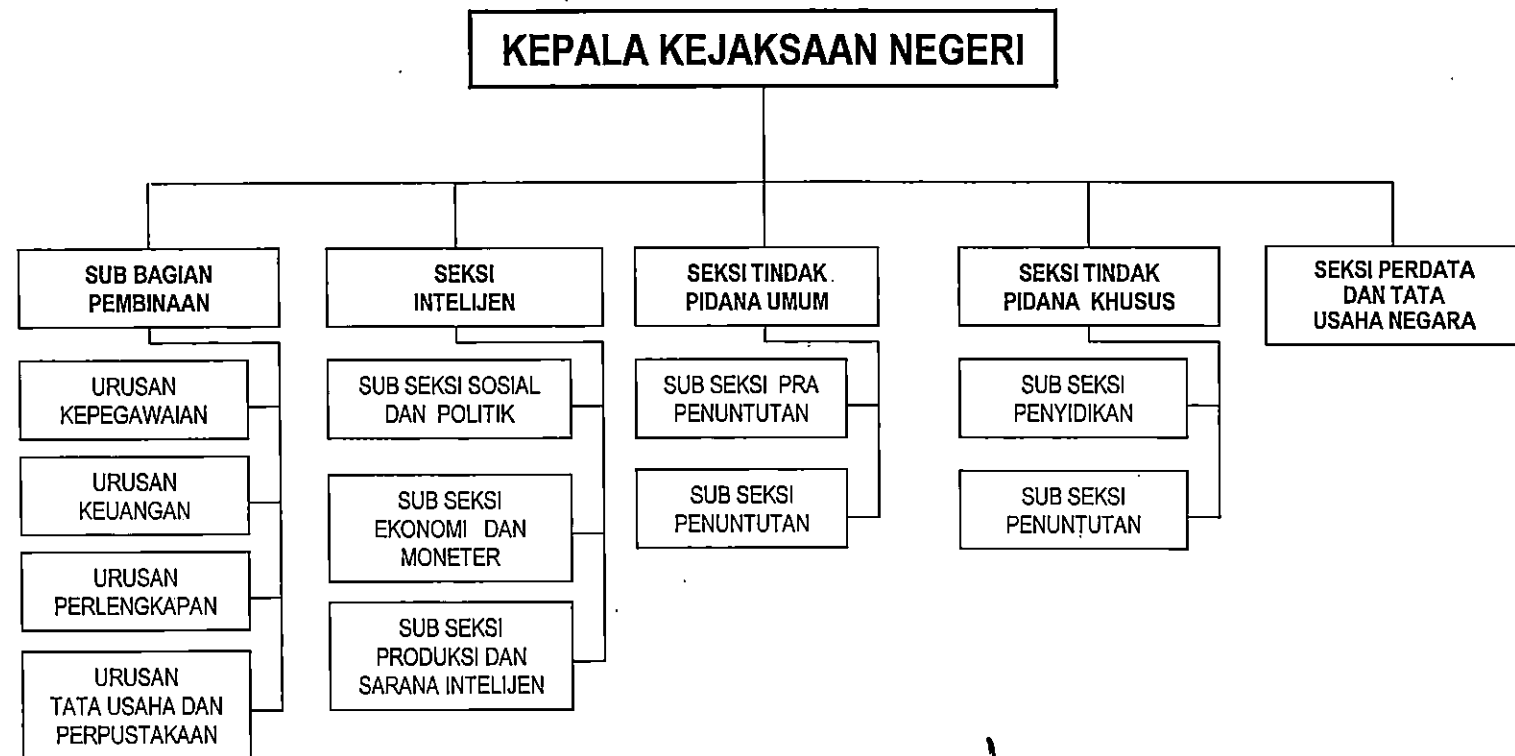
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		16-10-08
2.	Karo Cana		15-10-08
3.	Kabag		15-10-08
4.	Kasubbag		15-10-08
5.	Pelaksana		15-10-08
6.	Pengetik		15-10-2008

BAGAN ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI SUKA
MAKMUE, KEJAKSAAN NEGERI BLANGPIDIE, KEJAKSAAN
NEGERI WANGI-WANGI, KEJAKSAAN NEGERI PULAU
PUNJUNG, KEJAKSAAN NEGERI PADANG ARO, DAN
KEJAKSAAN NEGERI SINGAPARNA

Lampiran II : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia

Nomor : PER- 030 /A/JA/10/2008

Tanggal : 20 Oktober 2008



LEMBAR KONTROL SIP SURAT PADA SET JAMBIN		
NO	PEJABAT	PARAF TANGGAL
1	Sesjam Bin	<i>[Signature]</i> 16-10-08
2	Karo Cana	<i>[Signature]</i> 15-10-08
3	Kabag	<i>[Signature]</i> 15-10-08
4	Kasubbag	<i>[Signature]</i> 15-10-2008
	Pelaksana	<i>[Signature]</i> 15-10-2008
		<i>[Signature]</i> 15.10.2008

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

[Signature]

HENDARMAN SUPANDJI